

PROFIL DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 1 Tenggarong. Posisinya persis dipersimpangan antara Jalan Cut Nyak Dhien dan Jalan Ahmad Yani Tenggarong, merupakan tempat yang sangat strategis karena mudah dijangkau dari arah manapun dalam wilayah Kecamatan Tenggarong.

Berdirinya Dinas Sosial diawali pada zaman pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai. Ketika itu Dinas Sosial bernama Jawatan Sosial yang dipimpin oleh seorang kerabat Kesultanan Kutai bernama A.P.H.K. Poeger. Beliau menjabat mulai tahun 1960 sampai tahun 1975. Jawatan Sosial selanjutnya berubah nomenklatur menjadi Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai dan pertama kali dipimpin oleh Salman Karim, BSW.

Seiring dengan adanya wacana otonomi daerah, pada tahun 1995 Kabupaten Kutai menjadi salah satu daerah percontohan persiapan otonomi daerah. Kondisi menyebabkan Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai berubah lagi menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian pada tahun 2000 dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara, maka Dinas Sosial Kabupaten Kutai berubah lagi menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sampai sekarang.

Adapun sejarah perkembangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dari awal berdirinya sampai dengan sekarang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Instansi	Pimpinan	Tahun Menjabat
1	Jawatan Sosial	A.P.H.K. Poeger	1960 - 1975
2	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	Salman Karim, BSW	1975 - 1976
3	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	Drs. Zumrodi	1976 - 1983
4	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	M. Aries, BSW	1983 - 1984
5	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	HM. Roesli Basri	1984 - 1987
6	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	Salehudin	1987 - 1992

7	Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kutai	Drs. E. Achmad Syarbini	1992 - 1995
8	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Drs. E. Achmad Syarbini	1995 - 2000
8	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Drs. H. Juliansyah Djafar	2000 - 2005
9	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Drs. Mursito, MM	2008 - 2014
10	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Ir. Didi Ramyadi, MM	2014 - 2021
11	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	H. Hamly, S.E	2021 - 2024
12	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Drs. Yuliandris Suherdian	2024 - 2026
13	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Rinda Desianti, S. Sos.,M.Si	2026 - sekarang

Dasar Hukum Pembentukan

Tata laksana, kewenangan, dan legalitas operasional Dinas Sosial didasarkan pada peraturan berikut:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019).
- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022).
- **Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Ruang Lingkup Kegiatan (Tugas Pokok dan Fungsi)

- **Tugas Pokok:** Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- **Fungsi Pokok:**
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial daerah.
 - Pelaksanaan program kerja, koordinasi, dan administrasi umum lingkup sosial.
 - Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian urusan bidang sosial.
 - Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Berdasarkan tata ruang kelembagaan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023, susunan organisasi struktural terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat (membawahkan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kategori Jabatan Struktural (Eselon)

Klasifikasi tingkatan jabatan kepemimpinan mengacu pada pembagian berikut:

- **Kepala Dinas** (Eselon II.c / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama): Bertugas memimpin, menyimulasi, serta mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang sosial.
- **Sekretaris** (Eselon III.a / Administrator): Bertugas mengelola pelayanan administratif internal, aset, keuangan, perencanaan, kepegawaian, serta kehumasan.
- **Kepala Bidang (4 Bidang)** (Eselon III.b / Administrator): Bertugas memimpin pelaksanaan teknis operasional, pemantauan, dan evaluasi program spesifik di masing-masing bidang tugas.
- **Kepala Subbagian** (Eselon IV.a / Pengawas): Bertugas membantu Sekretaris dalam menangani urusan detail ketatalaksanaan, administrasi, dan kepegawaian.

(Catatan: Terjadi penyesuaian penulisan nomenklatur kode eselon umum/klasifikasi sesuai standar administrasi kepegawaian terkini demi presisi dokumen).

Gambaran Umum Satuan Kerja dan Struktur Pimpinan Teknis (Tahun Berjalan)

A. Kepala Dinas

- **Pimpinan:** Rinda Desianti, S.Sos., M.Si.
- **Fokus:** Selaku pucuk pimpinan tertinggi yang mengarahkan kebijakan makro pelayanan sosial instansi.

B. Sekretariat

- **Sekretaris:** Drs. Yuliandris Suherdian
- **Kepala Subbag Umum:** Serapul Anam, S.E., MM.
- **Tupoksi Utama:** Menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dinas. Bertanggung jawab terhadap tata usaha, manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penataan aset, kehumasan, penyusunan program/rencana kerja, serta penyusunan instrumen akuntabilitas instansi (ANJAB, ABK, LKPJ, LKPD, LKJIP, LPPD) sekaligus penguatan program Reformasi Birokrasi (E-Government, SOP, Layanan Pengaduan).

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

- **Kepala Bidang:** Sy. Gina Fathillah, S.E., M.Si.
- **Tupoksi Utama:** Berfokus pada peningkatan kemandirian masyarakat dan pendayagunaan potensi sosial. Ruang lingkup tugasnya mencakup pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), fasilitasi dan pengelolaan pengumpulan sumbangan/hibah sosial tingkat daerah, serta pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti kelembagaan masyarakat, pekerja sosial, dan pilar-pilar sosial lainnya.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- **Kepala Bidang:** Sunarko, SST., M.Si.
- **Tupoksi Utama:** Menangani pemulihan, rehabilitasi, dan integrasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatannya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti. Bidang ini juga memegang mandat pemulangan dan perlindungan awal bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (WNMKTk) dari titik debarkasi ke wilayah asal.

E. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- **Kepala Bidang:** Muhamad Japar, S.Sos., M.Si.
- **Tupoksi Utama:** Bertugas memberikan jaminan, perlindungan, dan jaring pengaman sosial yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat rentan. Fokus operasional mencakup pengelolaan data fakir miskin skala kabupaten, jaminan sosial keluarga, serta penanganan pemeliharaan anak-anak terlantar di luar panti agar hak-hak dasarnya terpenuhi.

F. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- **Kepala Bidang:** Riadi Hadiwinoto, S.Hut.
- **Tupoksi Utama:** Berfokus pada mitigasi pascabencana dan penghormatan nilai kepahlawanan. Bertanggung jawab atas perlindungan sosial bagi korban bencana alam maupun sosial, penyediaan logistik darurat, penguatan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (seperti Kampung Siaga Bencana), serta pemeliharaan sarana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) skala daerah.

Perkembangan & Data Sumber Daya Manusia (ASN)

Pada tahun 2026, sumber daya manusia aparatur (ASN) yang menggerakkan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari **PNS** dan **PPPK** dengan rincian sebagai berikut:

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS):**
 - **Jumlah:** 59 orang.
 - **Distribusi Jurusan/Pendidikan:** Sebagian besar didominasi oleh lulusan *Manajemen* (8 orang) dan *Ilmu Administrasi Negara* (7 orang), *Ilmu Administrasi Publik* (3 orang), serta program studi lainnya seperti *Pekerja Sosial/Peksos* (1 orang), *Budidaya Pertanian* (1 orang),

Ekonomi (1 orang), Ekonomi Pembangunan (1 orang), Ekonomika Pembangunan (1 orang), Ilmu Ekonomi (1 orang), Ilmu Ekonomi Pembangunan (1 orang), Ilmu Hubungan Masyarakat (1 orang), Manajemen Administrasi (1 orang), Manajemen Hutan (1 orang), Pendidikan Agama Islam (1 orang), serta Perbandingan Mazhab dan Hukum (1 orang).

- **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):**

- **Jumlah:** 48 orang.

- **Distribusi Pendidikan dan Gender:**

- **Jenjang S1:** 21 orang (10 Laki-laki, 11 Perempuan).

- **Jenjang SLTA:** 23 orang (10 Laki-laki, 13 Perempuan).

- **Jenjang SD:** 4 orang (2 Laki-laki, 2 Perempuan).

- **Jabatan Fungsional Khusus (Peksos & Pensos):**

- Kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) & Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebanyak 17 orang Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

- Saat ini baru tersedia **4 orang** (di mana 2 orang di antaranya berlatar belakang pendidikan non-linier hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional), sehingga Dinas Sosial masih mengalami kekurangan tenaga teknis fungsional di bidang sosial.